



PAJAK DAERAH

## Capaian PBB-P2 di Sleman Baru 42%

SLEMAN—Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman mencatat raihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga Mei 2025 menyentuh Rp33,5 miliar. Belum ada kalurahan yang lunas PBB P2. Adapun jatuh tempo pembayaran pada 31 Juli 2025.

Ketua Tim Kerja Pengembangan PAD Bidang Penagihan dan Pengembangan BKAD Sleman, Muhammad Agvian Megantara, mengatakan target PBB P2 pada 2025 sebesar Rp80,4 miliar. Pajak masuk baru sekitar 42%. Masih ada dua bulan lebih bagi BKAD untuk memaksimalkan PBB P2.

Dari total pendapatan tersebut, pendapatan masuk mencapai Rp32,42 miliar dan denda keterlambatan tahun

sebelumnya telah masuk Rp1,08 miliar. Adapun keterlambatan pembayaran PBB P2 akan dikenai denda 1% setiap bulannya. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Megantara menerangkan BKAD terus berupaya mengoptimalkan raihan PBB P2 seperti melakukan intensifikasi di setiap kalurahan sembari berkoordinasi dengan dukuh. Ada juga penagihan langsung ke wajib pajak. "Kalurahan yang lunas PBB-P2 belum ada. Tapi ada beberapa pedukuhan yang telah lunas," kata Megantara, Rabu (21/5).

Pedukuhan yang lunas berasal dari

Kalurahan Sendangtirto, Argomulyo, Sidokarto, Sidomoyo, Tamanmartani, Sendangagung, Sendangmulyo, Sendangsari, Sumberadi, Sumberagung, Sumbersari, Bimomartani, Sindumartani, Umbulmartani, Widodomartani, Harjobinangun, Madurejo, Sumberharjo, Margoagung, Margodadi, Margokaton, Margoluwih, Margomulyo, Pandowoharjo, Donokerto, Girikerto, Wonokerto, Lumbungrejo, Margorejo, Mororejo, Pondokrejo, dan Tambakrejo.

Sekretaris BKAD Sleman, Abu Bakar, mengatakan ketetapan awal PBB-P2 2025 sebesar Rp93,4 miliar dari 635.987 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Menurut Abu, ada sejumlah kendala penarikan PBB-P2, seperti

masih ada warga tidak mendapat sosialisasi jatuh tempo pembayaran, kekeliruan data, dan ada yang tidak ingin membayar pajak.

Upaya percepatan realisasi PBB-P2 terus dilakukan antara lain dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak. Ada penghargaan dan *doorprize* bagi wajib pajak, termasuk pedukuhan yang lunas 100% sebelum jatuh tempo.

Disinggung mengenai keterlambatan penerbitan SPPT PBB-P2 2025 yang baru dilakukan pada Februari, Abu menegaskan dia akan mengembalikan penerbitan SPPT tersebut pada awal Januari agar masyarakat dapat segera menerima surat pemberitahuan tersebut dan dapat segera ditindaklanjuti.

(Andreas Yuda Pramono)